

Pengaruh Nilai Budaya dalam Politik Lokal di Kabupaten Bone

Suhartono Firman^{1*}, Sukri², Puji Qomariyah³

¹Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, Indonesia

²Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Hasanuddin, Indonesia

³Sosiologi, FISIP, Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Indonesia

Email korespondensi: suhartono.sf@gmail.com

Abstract: *This paper aims to describe how sociological factors can influence people's political behavior in an election, especially the election of regional heads. Pilkada is a space provided by a democratic system for wider public participation in political life. Democracy guarantees the same rights that are given to every community to participate in contesting the elections. However, so far the phenomenon that has occurred in Bone Regency shows that the tendency of candidates who will be promoted and elected in the pilkada are those who come from the nobility, there is a belief as wija mapparenta is instilled in a sustainable manner to the next generation. The cultivation of faith as wija mapparenta is also accompanied by the cultivation of the akkarungeng value where the nobles in Bone have akkarungeng values, namely getteng, lempu, ada tongeng, sipakatau and temmappasilaingeng. On the other hand, the Bone community still maintains local values that exist in their area so that it raises the attitude of people who have the belief that akkarungeng values are important things that must be owned by leaders in their area. This then affects their political behavior which is shown by the direction of support for candidates in the regional elections in Bone Regency.*

Keywords: Akkarungeng, Region Election, Bone, Political Behavior, Nobility

Pendahuluan

Demokrasi secara harfiah dapat dimaknai sebagai pemerintahan oleh rakyat sebagai suatu kesatuan. Tetapi kemudian dalam konteks yang lebih luas Demokrasi tidak saja didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, tetapi juga pemerintahan untuk rakyat, yaitu pemerintah yang bertindak sesuai dengan kehendak rakyat (lihat Schmitter and Karl, 1991). Dengan demikian pemerintahan demokratik yang ideal diasumsikan sebagai pemerintahan yang akan bekerja berdasarkan aspirasi dan kebutuhan rakyatnya. Praktik semacam itu sejauh ini belum pernah terjadi dan cenderung akan sangat sulit untuk diwujudkan, akan tetapi demokrasi ideal yang sempurna tetap menjadi tolak ukur sebagai sumber inspirasi rezim demokrasi. Mekanisme yang ada di dalam sistem demokrasi kemudian menjadikan demokrasi saat ini dipandang sebagai salah satu sistem yang paling baik. Oleh karena itu kemudian sistem demokrasi dianut oleh hampir semua negara di dunia dengan tata cara pelaksanaannya yang berbeda (Sukri, 2018).

Salah satu aspek penting dalam upaya mewujudkan demokrasi adalah pelaksanaan pemilihan umum. Pentingnya pemilu bagi negara dengan sistem demokrasi diasumsikan Joseph Schumpeter dengan menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan jantung demokrasi karena pemilihan umum menjadi ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat menentukan pemimpinnya. Pemilihan Umum merupakan salah satu keputusan kelembagaan paling penting bagi demokrasi di mana pun. Secara teoritis terdapat banyak pilihan atas berbagai sistem pemilihan umum yang dapat diimplementasikan dalam suatu negara. Pilihan atas sistem pemilihan tertentu akan memiliki pengaruh yang mendalam untuk masa depan kehidupan politik di negara yang bersangkutan.

Pemilihan umum merupakan ruang sirkulasi kekuasaan dalam negara demokrasi yang diselenggarakan secara berkala. Dengan demikian, pelaksanaan pemilihan umum merupakan momen penting bagi proses demokrasi, salah satunya adalah proses demokrasi di Indonesia. Indonesia sebagai suatu negara demokratis telah melaksanakan pemilihan umum secara berkala sejak waktu yang cukup lama dimana pemilihan umum yang pertama kali dilakukan di Indonesia adalah pemilihan umum di tahun 1955.

Sistem Pemilihan umum dilaksanakan di Indonesia adalah sistem pemilihan langsung dimana semua masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pemilihan yang berlangsung. Pemilihan umum yang diimplementasikan di Indonesia dilaksanakan dalam beberapa level yakni ditingkat pusat dengan pemilihan umum presiden dan pemilihan kepala daerah diranah lokal. Mengingat pentingnya pemilihan umum, maka pelaksanaan pemilihan umum harus mencapai tujuan pemilihan umum itu sendiri. Dengan demikian setiap proses pemilihan umum termasuk pemilihan yang dilakukan untuk memilih kepala daerah melalui pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) juga harus berada dalam semangat yang sama. Pilkada sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus menjadi arena kompetisi yang paling adil untuk partai atau gabungan partai politik dengan mengusung calon kepala daerah.

Dalam konteks pilkada, rakyat kemudian memiliki kedaulatan untuk menentukan dan memilih kandidat sesuai dengan yang diinginkan ataupun kemudian melalui konteks pilkada rakyat dapat ikut serta berkontestasi untuk dipilih. Hal tersebut menunjukkan pentingnya setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat berdasarkan aturan yang berlaku untuk ikut terlibat dalam setiap proses pilkada termasuk untuk ikut memilih maupun dipilih dalam suatu pemilihan yang menjunjung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berdasarkan kondisi ini kemudian nampak pentingnya masyarakat untuk dapat ikut berperan dengan baik berdasarkan pada standar preferensi politik yang tepat dan standar rasionalitas yang kemudian hal ini akan berimplikasi pada peluang masyarakat untuk dapat bertindak secara tepat dalam konteks pilkada (lihat Marquis, 2010).

Dengan demikian untuk dapat memastikan masyarakat dapat bertindak secara tepat maka aspek internal masyarakat sebagai pemilih pada dasarnya menjadi aspek yang sangat penting. Tetapi, dalam tataran realita tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat berbagai aspek penting yang berasal dari lingkungan eksternal individu dalam masyarakat yang kemudian dapat memberikan pengaruh pada keterlibatan mereka dalam kegiatan pemilihan termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah secara teoritik kemudian dapat dianalisis melalui tiga pendekatan yakni pendekatan psikologis, rasional dan sosiologis. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa keterlibatan dan perilaku yang ditunjukkan oleh individu dan masyarakat akan sangat mungkin untuk dipengaruhi oleh ketiga pendekatan tersebut atau salah satu diantaranya secara dominan.

Salah satu daerah yang telah melaksanakan pilkada adalah Kabupaten Bone. Pilkada yang diselenggarakan memperlihatkan bahwa nilai-nilai sosial terkait dengan nilai kebangsawanan masih cukup memberikan pengaruh pada perilaku politik masyarakat. Untuk itu kemudian secara khusus tulisan ini bermaksud untuk menunjukkan adanya pengaruh aspek sosiologis dalam perilaku politik masyarakat di pilkada Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada tahun 2020. Tulisan ini mencoba untuk

menunjukkan bagaimana aspek nilai-nilai kebangsawanan atau yang disebut dengan *akarungeng* masih tetap dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku politik masyarakat di Kabupaten Bone dalam pilkada tahun 2020.

Metode

Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan di Bone tahun 2020 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis internalisasi nilai-nilai *akkarungeng* di Kabupaten Bone dalam pemilihan kepala daerah dan dinamika pemilihan kepala daerah dalam analisis politik *akarungeng*. Melalui proses wawancara mendalam yang dilakukan terhadap beberapa informan kunci yang terdiri atas kandidat dalam pilkada, penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, akademisi dan kalangan masyarakat, penelitian yang dilakukan menganalisis bagaimana internalisasi nilai-nilai *akkarungeng* terjadi dalam masyarakat Kabupaten Bone yang memberi pengaruh pada perilaku mereka dalam pilkada 2020.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sejarah Singkat Kabupaten Bone

Bone dalam sejarahnya merupakan salah satu kerajaan besar dari sejumlah kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Wilayah Kerajaan Bone meliputi seluruh daerah yang saat ini secara administratif berada dalam wilayah Kabupaten Bone. Sebelum terbentuknya Kerajaan Bone, di daerah ini terdapat sejumlah *wanua*. Hubungan yang berlangsung antar *wanua* tidak selalu dalam kondisi yang harmonis tetapi nampak bahwa konflik antar *wanua* juga cukup sering terjadi. Salah satu penyebab konflik yang terjadi tertuang dalam naskah lokal. Berdasarkan naskah lokal berupa *lontarak* dan sumber-sumber lainnya ditemukan informasi bahwa setelah keturunan Sawerigading sudah tidak ada lagi, kekacauan terjadi di dalam masyarakat, kekacauan ini disebabkan oleh anggota masyarakat yang tidak lagi menghiraukan hukum dan adat istiadat yang selama ini menjadi pegangan bagi tatanan kehidupan bersama masyarakat.

Hukum dan adat istiadat yang tidak lagi menjadi tatanan kehidupan masyarakat digantikan dengan hukum rimba dimana pengaturannya adalah yang kuat akan menguasai yang lemah atau yang kemudian dikenal dengan istilah *sianre baleni tauwe*. Kondisi ini kemudian dapat dimaknai bahwa tidak adanya tatanan dalam kehidupan masyarakat akan mengancam eksistensi masyarakat yang lemah karena hukum rimba yang berlangsung akan menjadikan pihak yang kuat sebagai penguasa. Hal ini kemudian terjadi karena pada masa itu tidak terdapat tata tertib dan kemudian berimplikasi pada hilangnya ketentraman dalam kehidupan bersama masyarakat karena yang kuat akan menguasai yang lemah. Kondisi kekacauan ini berlangsung selama *tujuh pariyama* (generasi). Berdasarkan hitungan tahun masehi, satu *pariyama* setara dengan 100 tahun, sehingga dengan mengacu konversi ini maka konflik yang terjadi berlangsung selama 700 tahun sebelum kemunculan *To Manurung*.

Bone kemudian hadir sebagai wujud kerjasama dari *wanua* yang saling berkonflik. Terdapat tujuh *wanua* yang saling berkonflik yakni *Ujung, Tibojong, Ta, tanete Ri Attang, Tanete ri Awang, Ponceng dan Macege*. Tujuh *wanua* yang hidup dalam kondisi konflik ini kemudian melakukan upaya untuk dapat menjalin kerjasama sebagai upaya untuk membentuk suatu persekutuan atau

ikatan (*kawenrang*) yang kemudian dikenal dengan *kawenrang tanah Bone*.

Persekutuan *kawenrang tanah Bone* ini kemudian di abad ke-14 mengalami perkembangan menjadi suatu kerajaan yang kemudian dikenal dengan Kerajaan Bone (1300-1960). Kerajaan Bone dipimpin oleh *To Manurung* sebagai raja pertama. Lambat laun Kerajaan Bone tumbuh menjadi suatu kerajaan yang besar. Dalam perkembangan sejarahnya yang Panjang, Kerajaan Bone kemudian berkembang menjadi salah satu kerajaan yang berpengaruh dan sangat disegani di Sulawesi Selatan. Kepemimpinan *To Manurung* di Kerajaan Bone berhasil mengakhiri konflik dan menciptakan ketertiban sehingga rakyat kemudian dapat menjadi lebih sejahtera. Ditetapkannya *To Manurung* diikuti dengan pembentukan Dewan Penasehat, *Ade Pitu* (tujuh penguasa), yang merupakan lembaga pembantu utama pemerintahan Kerajaan Bone yang bertugas mengawasi dan membantu pemerintahan kerajaan Bone :

- a. *Arung Ujung*, bertugas mengepalai urusan penerangan Kerajaan Bone.
- b. *Arung Ponceng*, bertugas mengepalai urusan kepolisian/kejaksaan dan pemerintahan.
- c. *Arung Ta*, bertugas mengepalai urusan pendidikan dan urusan perkara sipil.
- d. *Arung Tibojong*, bertugas mengepalai urusan perkara/ pengadilan *landschap*/hajat besar dan mengawasi urusan perkara pengadilan distrik.
- e. *Arung Tanete Riattang*, bertugas mengepalai memegang kas kerajaan, mengatur pajak dan mengawasi keuangan
- f. *Arung Tanete Riawang*, bertugas mengepalai pekerjaan negeri (*Landschap Werken – LW*) Pajak Jalan Pengawas *Opzichter*.
- g. *Arung Macege*, bertugas mengepalai pemerintahan umum dan perekonomian

Dewan Penasehat, *Ade Pitu* (tujuh penguasa), merupakan lembaga pembantu utama pemerintahan Kerajaan Bone. Sejarah Bone mencerminkan bahwa diplomasi menjadi hal yang sangat dibutuhkan sebagai usaha dan bagian penting untuk membangun negeri menjadi lebih baik. Pandangan seperti itu tampak jelas ketika menelusuri puncak-puncak kejayaan Kerajaan Bone dimasa lalu. Akhirnya saat ini, dengan berpegang pada *motto Sumange' Tealara* yakni teguh dalam keyakinan kukuh dalam kebersamaan, pemerintah dan masyarakat Bone akan mampu menghadapi segala tantangan menuju Bone yang lebih baik.

Berdasarkan konteks sejarah yang ada menunjukkan bahwa *To Manurung* telah mampu membawa Kerajaan dan rakyat Bone menuju kondisi yang lebih baik dengan demikian keturunan bangsawan dari *To Manurung* menjadi justifikasi pada kemampuan mereka untuk memimpin di Kabupaten Bone yang terwujud dalam *Akkarungeng*. *Akkarungeng* di Kabupaten Bone memiliki peranan penting dalam perpolitikan salah satunya dalam pemilihan kepala daerah. Bangsawan di Kabupaten Bone banyak melibatkan dirinya dalam pemilihan kepala daerah karena bangsawan menyadari akan eksistensi dirinya terhadap asal-usulnya sebagai keturunan pemimpin yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepemimpinan.

Bangsawan Bone berasal dari keturunan raja-raja Bone terdahulu yang merupakan keturunan pemimpin di Bone pada zamannya. Serta sebagai bentuk penghargaan terhadap warisan leluhur, hingga mereka dijuluki *arung* (bangsawan). Masyarakat Bone mengenal bangsawan sebagai keturunan *wija abbatireng ajjoareng/ wija to mapparenta* yang dapat dimaknai bahwa dalam diri bangsawan sudah terpatriti atau mengalir darah dari seorang pemimpin yang dihormati dan disegani.

2. Kesadaran akan Nilai Kebangsawanan

Kalangan bangsawan di Kabupaten Bone memiliki kesadaran akan asal-usulnya dan melalui keluarga utamanya orang tua ditanamkan keyakinan dan sikap untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kepemimpinan serta menghormati sejarah leluhur bangsawannya. Dalam diri bangsawan di Kabupaten Bone ditanamkan keyakinan bahwa di dalam dirinya mengalir darah pemimpin yang kemudian membuat para bangsawan di Kabupaten Bone senantiasa termotivasi untuk tetap mempertahankan eksistensinya sebagai *wija mapparenta* (keturunan pemimpin). Penanaman nilai sebagai *wija mapparenta* tidak hanya sekedar penanaman nilai tentang kepemimpinan tetapi juga terkait dengan keharusan bagi para bangsawan untuk memiliki kepribadian dan kemampuan yang memadai untuk menjadi seorang pemimpin yang mampu mewujudkan nilai *getteng, lempuk, ada tongeng, sipakatau, dan temmappasilaingeng*.

Selain itu, nilai-nilai kepemimpinan para bangsawan juga nampak dalam *lontarak toa* yang menyebutkan lima syarat yang harus dipenuhi seseorang ketika ingin menjadi raja (pemimpin) yakni takwa kepada Allah Taala, *sirik* terhadap sesama manusia, takut melakukan dusta, kasih sayang kepada rakyat yang menjadi tanggung jawabnya, dan menegakkan kepastian hukum dengan kejujuran terhadap siapapun. Hal tersebut sejalan pula dengan pemikiran *Kajao Laliddong* yang menyebutkan ada lima syarat yang harus dimiliki oleh seorang raja atau pemimpin yaitu :

- a. *Lempuk'e nasibawangi tauk* (kejujuran disertai takut atau taqwa)
- b. *Ada tongeng nasibawangi tikek* (kata yang benar disertai waspada)
- c. *Sirik'e nasibawangi getteng* (sirik atau harga diri yang disertai ketegasan)
- d. *Awaraningeng nasibawangi cirinna* (keberanian yang disertai kasih sayang)
- e. *Akkalengge nasibawangi nyamekkininnawa* (kecerdasan yang disertai ketenangan hati)

Nilai-nilai *Akkarungeng* ditanamkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadikan anak *arung* sebagai bangsawan yang sesungguhnya dengan memiliki sikap *getteng, lempu, ada tongeng, sipakatau dan temmappasilaingeng*.

Nilai-nilai historis dan budaya tidak dapat ditinggalkan dalam perpolitikan lokal di Kabupaten Bone salah satunya terwujud dalam pilkada yang diselenggarakan di Kabupaten Bone. Hal ini karena nilai-nilai itu berasal dari konsep kepemimpinan *to manurung seperti getteng, lempu, ada tongeng, temmappasilaingeng, sipakatau*. Nilai-nilai ini tercermin dari karakter yang dimiliki seseorang pemimpin, meskipun pada dasarnya tidak ada pemimpin yang sempurna. Selain itu *ada tongeng* harus dibuktikan dengan memperlihatkan bahwa apa yang telah dikatakan adalah benar sesuai dengan fakta yang ada. Berkata benar sangat ditekankan oleh orang tua sebagaimana yang diwariskan oleh leluhur dalam *paseng* (pesan) orang bugis. Salah satu pesan itu adalah "*Makkeda topi torioloe naiya parajaiye tana*" (berkata pula orang dulu apabila kita memegang pemerintahan), harus berpegang pada ketentuan berikut :

- a. *Seuw ni ada tongengnge* (berkata benar)
- b. *Maduanna ampe madecenng* (perbuatan yang baik)
- c. *Matellunna bicara malempue, appa ia ritu gau madecenge na bicara malempu'e iana ritu mpawai pattaungenge* (menghakimi dengan jujur disertai perilaku yang baik, karena hakim yang benar dan jujur itulah yang akan membawa kesejahteraan negeri)
- d. *Maeppana, janci tenrilukaiye, enrenng* *ulu ada tenriwelaiye* (janji tidak teringkari dan

- sumpah yang tak terabaikan)
- e. *Malimanna, ade ri periesseri'e* (adat yang dibina bersama)
 - f. *Maennenna, rapang masse'e* (perumpamaan yang dipegang teguh)
 - g. *Mapitunna, wari'riatutuiye* (tatacara/aturan yang dilaksanakan secara seksama)
 - h. *Maruana, ada siturunge ri laleng mpanua* (kata sepakat yang sudah diikrarkan harus dijunjung bersama)
 - i. 9. *Maserana tangnga' tessimala'e* (tidak saling bertentangan pandangan)
 - j. 10. *Maseppolona, siakkasirisengnge* (saling menjaga/melindungi harga diri)
 - k. 11. *Maseppulo seuwana, tessi mellekiannge innawa ri sempanuaana, enrennge ri seajinna* (tidak saling rela (tega) terhadap sesamanya orang dalam negeri atau keluarganya).

Ketentuan yang ada ini kemudian menjadi acuan bagi para pemimpin di masyarakat bugis dalam menjalankan suatu amanah sebagai pemimpin. Nampak adanya kecenderungan dari pemimpin di Bugis untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi dimana para pemimpin tidak akan menyampaikan informasi kepada masyarakat yang dipimpinnya apabila informasi tersebut tidak valid. Apabila dalam kondisi tertentu informasi harus disampaikan maka informasi yang disampaikan oleh para pemimpin akan diikuti dengan perkataan *gare* (katanya) atau *naseng tauwe* (kata orang-orang).

Nilai-nilai *akkarungeng* yang tertanam dalam diri keturunan bangsawan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari serta membentuk karakter. Nilai tersebut kemudian terinternalisasi dalam masyarakat Kabupaten Bone dalam memilih pemimpin. Disisi lain nilai tersebut kemudian akan diabaikan oleh masyarakat ketika seorang pemimpin tidak berhasil dalam menjalankan amanah dari rakyatnya.

Nilai-nilai *akkarungeng* telah ada sejak dahulu dan diwarisi oleh masyarakat Bugis dalam tata cara berperilaku salah satunya terwujud dalam sikap *sipakatau* yang telah menjadi pandangan hidup orang Bugis sejak dahulu. Nilai *sipakatau* merupakan nilai yang telah ada sejak manusia dilahirkan, nilai ini terlahir dari rumpun keluarga bangsawan yang merupakan keluarga yang memiliki keluhuran, arif, dan bijaksana sebagai suatu prinsip hidup yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pedoman hidup hingga saat ini.

Nilai yang terkandung dalam nilai *sipakatau* adalah nilai perdamaian, kebersamaan, menghormati, saling menegur, kasih sayang, persatuan, kerja sama dan gotong royong. Secara spesifik nilai *sipakatau* mengandung nilai saling menghormati yang merupakan sifat memanusiaikan manusia. Nilai *sipakatau* menunjukkan bahwa, orang Bugis memposisikan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia dan oleh karena itu manusia harus dihargai dan diperlakukan secara baik. *Sipakatau* mengandung nilai bagaimana menempatkan siapapun pada posisi sebagai manusia dimana ajaran ini sejalan dengan agama. Nilai *sipakatau* dari seorang pemimpin perlu ditampilkan sebagai pemimpin yang baik dan disegani oleh masyarakat perlu ditampakkan dalam perilaku. Nilai-nilai *akkarungeng* yang dimiliki oleh sosok pemimpin menjadikannya menjadi idola bagi masyarakat. Nilai *sipakatau* yang menjadi karakter dasar bangsawan yang kemudian dijadikan dasar untuk mendidik anak-anaknya. Kemudian dipersiapkan menjadi pemimpin hal tersebut terlihat bagaimana para pemimpin dari kalangan bangsawan mempersiapkan sejak dini anak-anak. Nilai *sipakatau* yang ditanamkan pada diri

seorang pemimpin tentu ia akan selalu menghargai dan memperlakukan rakyatnya secara sama tanpa melihat asal-usulnya.

Pada konteks pemilihan kepala daerah, nilai *sipakatau* akan memposisikan dan menghormati masyarakat secara sama, tanpa membedakan status sosial dan jabatan. Masyarakat memiliki hak suara yang sama, baik yang kaya maupun yang miskin. Seorang pemimpin memperlakukan semua masyarakatnya sama, karena pada dasarnya manusia sama di mata penciptanya. Konsep *sipakatau* dengan demikian memperlihatkan bahwa yang dihormati bukan individu tetapi pencipta karena setiap manusia memiliki asal yang sama. Dengan demikian, setiap orang akan diperlakukan secara sama. Selain nilai *sipakatau*, masyarakat juga mengenal nilai *sipakainge* (saling mengingatkan) sebagai upaya agar selalu mawas diri dan dalam konteks pilkada nilai ini dapat digunakan untuk saling menjaga sehingga walaupun masyarakat memiliki pilihan yang berbeda mereka tidak akan mudah untuk terprovokasi ataupun menjadi bagian dari provokator. Nilai yang terakhir adalah *Sipakalebbi* (saling memuliakan), dengan nilai ini masyarakat akan saling menampilkan sikap yang tepat dalam menghadapi setiap perbedaan yang ada.

Kepemimpinan bangsawan yang saat ini ada di Bone dapat diasumsikan berasal dari kepemimpinan *To Manurung* Raja Bone pertama. *To Manurung* dalam mitologi masyarakat Bone dinyatakan datang secara tiba-tiba sebagai penyelamat dan pada akhirnya menjadi bagian dari masyarakat dengan menjadi pemimpin. Sebagaimana menurut dari teori pemimpin populis yang dipaparkan oleh Panizza dalam Anders Hellstrom bahwa pemimpin populis adalah pemimpin yang menjadi bagian dari masyarakat dan masyarakat menjadi bagian dari kepemimpinannya. *To Manurung* datang dan muncul sebagai orang biasa ditengah orang yang bertikai yang pada akhirnya menjadi pemimpin yang luar biasa yang menjadi bagian dari masyarakat yang dipimpinya begitupun bupati-bupati yang terpilih yang pernah memimpin. Adapun alasan utama masyarakat memilih kaum bangsawan sebagai pemimpinnya adalah karena mereka identik dengan beberapa hal berikut:

- a. *To Manurung* yakni orang yang dipercayai masyarakat Bugis merupakan orang yang turun dari langit dan secara khusus diutus oleh para Dewa untuk memimpin di bumi ini. Orang yang turun dari langit inilah kemudian menikah dan selanjutnya keturunan merekalah dipercayai oleh masyarakat Bugis mengangkat mereka sebagai pemimpin yang memiliki nilai-nilai *akkarungeng*
- b. *To Warani* yakni orang yang berani melindungi masyarakatnya dari gangguan luar.
- c. *To Acca'* yakni orang yang pintar karena dulunya hanya kaum bangsawan yang memiliki kesempatan untuk menuntut pendidikan karena memiliki modal ekonomi yang banyak, seperti menjadi tuan tanah dan sebagai pengusaha sukses.
- d. *To Sugi'* yang berarti orang kaya, dimana dengan kekayaan mereka mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya dan mampu memenangkan pemilihan.

Hal-hal inilah yang dimiliki oleh para bangsawan sehingga menjadikan mereka memiliki banyak pengikut/basis massa. Selain itu kepercayaan penuh dari masyarakat biasa untuk meminta perlindungan kepada bangsawan merupakan modal utama mereka dalam memerintah atau menjadi pemimpin. Hal ini kemudian dikuatkan oleh para bangsawan sebagai bagian dari upaya untuk meneruskan garis kepemimpinannya dengan menginternalisasikan nilai-nilai *akkarungeng* seperti *getteng*, *lempu*, *ada tongeng*, *sipakatau* dan *temmappasilaingeng* dalam diri anak

keturunan bangsawan. Selain memanfaatkan nilai-nilai historis dan budaya para bangsawan juga melakukan upaya pengembangan diri dengan akses pendidikan yang dimilikinya sehingga para bangsawan kemudian mampu memperoleh kecerdasan yang tidak dapat diakses oleh semua orang. Bangsawan yang memiliki sifat serta karakter demikian kemudian mampu mengambil simpati masyarakat untuk menjadi pemimpin diantara mereka. Kepemilikan modal sosial dan tingkat pendidikan yang baik telah menjadikan para elit-elit Bugis mampu menempati dan mendominasi kedudukan-kedudukan strategis.

Para bangsawan atau *Arung* telah memperlihatkan eksistensinya dalam perpolitikan di Kabupaten Bone yang nampak dari dominasinya dalam pemerintahan kepala daerah di Kabupaten Bone sejak Pemerintahan *Afdeling* pada tahun 1951-1955 dan berlangsung hingga saat ini. Walaupun demokrasi dengan sistem pemilihan langsung yang diterapkan telah memberikan ruang pada setiap masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk ikut berkontestasi berbeda dengan kondisi sebelumnya dimana pemimpin yang harus berasal dari keturunan Raja Bone. Tetapi, dalam setiap pilkada yang dilakukan memperlihatkan bahwa nilai-nilai *akkarungeng* masih tetap menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih pemimpinnya.

Kondisi dimana bangsawan nampak seolah mendominasi kepemimpinan di Kabupaten Bone sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Yakub bahwa mayoritas Etnis Bugis memiliki gaya berfikir yang cenderung lebih revolusioner daripada konservatif/ortodoks dan pragmatis. Revisionis artinya Etnis Bugis memandang desentralisasi kekuasaan dan kewenangan lebih luas sebagai tindakan yang mungkin dilakukan dengan lebih baik di Kabupaten Bone dengan memperlihatkan nilai-nilai lokal. Selain itu, perubahan model desentralisasi politik yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal dapat dilakukan secara bertahap seiring dengan semangat persatuan nasional dan pembangunan bersama untuk kemakmuran masyarakat.

Pemilihan kepala daerah dengan demikian dilakukan dengan mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal seperti nilai-nilai *akkarungeng*. Kecenderungan di dalam masyarakat terkait posisi kepemimpinan bangsawan ini kemudian ditangkap oleh partai politik dan diwujudkan dalam aktor yang diusung partai politik yang seringkali akan mengusung para bangsawan sebagai kandidat. Hal ini nampaknya terkait dengan masig pentingnya aspek legitimasi kultural dalam konteks politik lokal (Yunus and Tamma 2014).

Nilai-nilai *akkarungeng* yang masih tertanam dalam diri bangsawan dan nilai-nilai historis serta budaya yang masih dipelihara oleh masyarakat Kabupaten Bone. Hal ini menjadikan hal tersebut modal bagi para bangsawan untuk ikut berkontestasi dalam pilkada di Kabupaten Bone. Secara konseptual terdapat tiga modal yang harus dimiliki oleh para calon yang akan ikut berkontestasi dalam pilkada yang saat ini diselenggarakan secara langsung yakni modal politik (*political capital*), modal sosial (*social capital*) dan modal ekonomi (*economic capital*). Dari ketiga modal tersebut A. Fashar Padjalangi sebagai salah satu kandidat dalam pilkada di Kabupaten Bone memiliki ketiganya oleh sebab itu kemudian terbuka ruang bagi A. Fashar Padjalangi untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya, disamping sebagai incumbent yang tentunya dengan posisi itu A. Fashar Padjalangi dapat mensosialisasikan dirinya sendiri untuk mempengaruhi pola pikir para pemilih di Kabupaten Bone.

Kesimpulan

Nilai-nilai *akkarungeng* seperti *getteng*, *lempu*, *ada tongeng*, *sipakatau* dan *temmappasilangeng* yang dimiliki seorang bangsawan menjadi salah satu bagian yang dapat menarik simpati masyarakat dalam kontestasi pilkada untuk menjadikan para bangsawan sebagai seorang pemimpin. Di sisi lain nilai-nilai ini kemudian eksis dimasyarakat karena masyarakat Kabupaten Bone masih berpegang pada nilai-nilai historis dan budaya yang menempatkan bangsawan sebagai salah satu entitas yang memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin yang kemudian dilekatkan dengan nilai-nilai *akkarungeng*.

Terdapat kecenderungan adanya upaya internalisasi nilai-nilai *akkarungeng* secara terus menerus oleh keluarga bangsawan untuk keturunannya. Kekuasaan politik yang diperoleh kaum bangsawan dimasa lalu, kemudian ingin dipertahankan dengan mendidik generasi selanjutnya untuk terjun di dunia politik, sebagai sarana untuk memperoleh posisi pemimpin. Doktrin yang berkembang di masyarakat memberikan pengaruh untuk memilih pemimpin dari kalangan bangsawan karena reputasi keluarga, karakter yang dimiliki dan stigma yang sudah berkembang bahwa bangsawan adalah *wija mapparenta* (keturunan bangsawan). Masyarakat masih tetap memiliki keyakinan bahwa bangsawan memiliki darah kepemimpinan. Karakter dan darah pemimpin yang dimiliki ini seperti *getteng*, *lempu*, *ada tongeng*, *sipakatau*, dan *temmappasilangeng* telah mewakili sifat kepemimpinan yang baik di masyarakat

Selain internalisasi nilai, akses terhadap pendidikan menjadi bagian penting lainnya. Sehingga para bangsawan yang ikut berkontestasi dalam pilkada memiliki modal sosial yang didukung dengan pendidikan yang memadai yang seringkali sulit diakses oleh kaum bukan bangsawan. Hal ini kemudian menjadikan kaum bangsawan lebih banyak dilirik oleh partai politik untuk dibina sebagai kader yang nantinya akan diusung menjadi kandidat dalam pilkada yang akan berlangsung.

Ucapan Terimakasih

Melalui tulisan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia sebagai pemberi beasiswa Tata Kelola Pemilu (TKP) untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup KPU sebagai upaya untuk pengembangan kapasitas ASN. semoga tulisan ini dapat memberikan informasi dan tambahan pengetahuan yang bermanfaat dalam perkembangan studi kepemiluan di Indonesia.

Referensi

- Andi Yakub, Ahmad Bashawir Haji Abdul Ghani, Mohammad Syafii Anwar. 2018. Bugis Ethnic Perception Towards Urgency Of Political Decentralization And District Autonomy In South Sulawesi, Indonesia. *International Journal of Multidisciplinary Research and Development* . Volume 5 Issue 10. Oktober.
- Marquis, Lionel, 2010. Understanding Political Knowledge and Its Influence on Voting Preference in the 2007 Federal Election. *Swiss Political Science Review* 16(3): hal. 425-456.
- Miriam Budiarmo, 2003. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Yuliani Widianingsih. Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia: Suatu Tinjauan Dari Aspek Sejarah Dan Sosiologi Politik, Jurnal signal , Volume 5 Nomor 2. Hal.
- Yunus, Rabina dan Sukri Tamma, 2014. Importance of Cultural Legitimacy to the Local Government in Indonesian Democracy. Journal BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi. Vol. 21, Issue 1. Hal. 27-34.
- Sahril Buchori dan Nurfitriany Fakhri. 2018. Nilai-Nilai Kedamaian Dalam Perspektif Suku Bugis dan Makassar. Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling , Volume.2 Nomor 1.
- Schmitter , Philippe C. and Terry Lynn Karl, 1991. What Democracy is...and Not. Journal of Democracy. Summer 1991. Hal. 3-16.
- Sukri, 2018. The Toraja as an Ethnic Group and Indonesian Democratization Since the Reform Era. (Dissertation) Bonn University, Germany.